

**KAJIAN KEMISKINAN PESISIR DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok)**

Mita Natalia¹ dan Muhammad Mukti Alie²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : mitanatalia29@gmail.com

Abstrak: *Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan terjadinya proses pembangunan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Namun, kenyataannya proses pembangunan yang terjadi saat ini lebih terpusat pada daerah pusat kota dibandingkan kawasan pinggiran (pesisir). Tambak Lorok merupakan kawasan pesisir yang terletak di sebelah utara Kota Semarang. Letaknya yang berdekatan dengan laut mengakibatkan kawasan ini berkembang menjadi kampung nelayan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Letak Tambak Lorok yang dekat dengan sumber daya laut nyatanya belum mampu mensejahterakan masyarakatnya karena kawasan Tambak Lorok masih teridentifikasi sebagai salah satu kawasan miskin. Dari permasalahan yang diuraikan diatas maka muncul suatu pertanyaan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pesisir Tambak Lorok dan bagaimana bentuk kemiskinan yang terjadi. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing faktor penyebab kemiskinan pesisir terhadap kondisi kemiskinan di Kampung Nelayan Tambak Lorok. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur dan kepemilikan modal dan teknologi mempengaruhi terjadinya kemiskinan di kawasan Tambak Lorok, sehingga bentuk kemiskinan yang terjadi di kawasan Tambak Lorok dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan natural.*

Kata Kunci : *Pesisir, Kampung Nelayan, Kemiskinan*

Abstract: *The population growth in the region resulted in the emerging of developing processes to support the community activities. However, the developing processes nowadays are more concentrated in the downtown rather than in the periphery region (coastal region). Tambak Lorok is a coastal region in north Semarang City. The location which is adjacent to the sea caused this region is developed as the fishermen's village. The location of Tambak Lorok which is very close to the sea haven's been able to increase the welfare of the society, because Tambak Lorok is still identified as poverty area. From those problems, comes the research question about the factors causes the coastal poverty in Tambak Lorok and what's the form of poverty that occurs. Method used is qualitative method, to observe how's the impact of each factor causes the coastal poverty toward the poverty conditions in Fishermen's Village of Tambak Lorok. From the research done, the result shows that human resources quality, infrastructure condition, and the ownership of capital and technology factors caused the poverty in Tambak Lorok, therefore the form of poverty occurs in Tambak Lorok is categorized as natural form of poverty.*

Keywords: *Coastal, Fisherman Village, Poverty.*

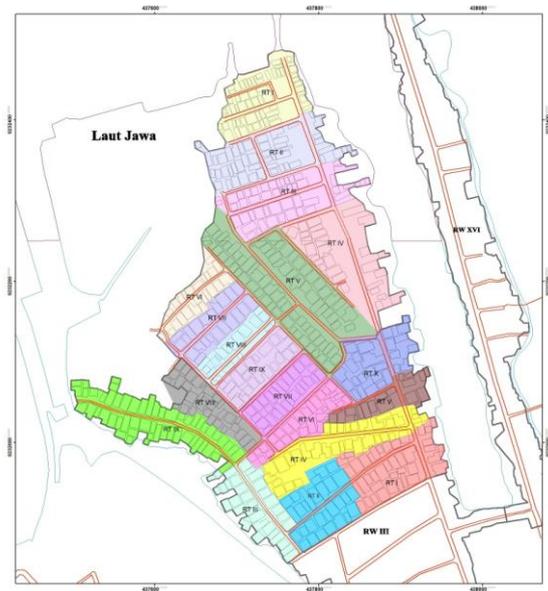
PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan terjadinya proses pembangunan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Namun, kenyataannya proses pembangunan yang terjadi saat ini lebih terpusat pada daerah pusat kota dibandingkan kawasan pinggiran. Budiharsono (2009;11) mengatakan bahwa pembangunan dikawasan pesisir relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah daratan lainnya, sehingga masyarakat pesisir relatif lebih miskin dibandingkan dengan wilayah lain.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya laut yang melimpah, sehingga banyak masyarakatnya yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai mata pencaharian utama. Namun, dengan kondisi sumber daya laut yang melimpah di kawasan pesisir nyatanya belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Wilayah pesisir masih merupakan salah satu kawasan yang identik dengan kemiskinan. Ridlo (2001;1) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi dalam kegiatan pembangunan yang ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Seperti yang dikatakan oleh Sumodiningrat (2011;26) bahwa kemiskinan merupakan permasalahan dalam pembangunan yang bersifat multidimensi yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Masyarakat pesisir menurut Nikijulw (2001) merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.

Menurut data BPS (2011) jumlah nelayan terbesar berada di Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara dengan jumlah 2.345 nelayan. Kawasan Tambak Lorok merupakan salah satu kawasan pesisir yang terletak di Kelurahan Tanjungmas yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai nelayan. Kampung Nelayan Tambak Lorok menjadi salah satu perkampungan nelayan yang

terletak di garis pantai Laut Jawa. Lokasi Tambak Lorok yang dekat dengan laut mengakibatkan kawasan ini berkembang menjadi kampung nelayan. Para Nelayan yang tinggal di Tambak Lorok sebagian besar merupakan nelayan tradisional yang masih menggunakan alat- alat sederhana dalam bekerja dan sangat tergantung pada cuaca. Herusansono (2012) mengatakan bahwa Kampung Nelayan Tambak Lorok masuk dalam kategori kampung miskin yang penduduknya tercatat lebih dari 500 keluarga. Dari uraian tersebut maka muncul suatu pertanyaan mengenai apa saja faktor yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan pesisir dan bagaimana bentuk kemiskinan yang terjadi di Kampung Nelayan Tambak Lorok



Sumber: Penyusun, 2013

GAMBAR 1
ADMINISTRASI KAWASAN TAMBAK LOROK
RW XIV DAN RW XV

KAJIAN LITERATUR

Pesisir

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki potensi sumberdaya laut yang terdapat didalamnya, dengan posisi geografis yang berada pada

pertemuan antara wilayah darat dan laut. Kodoatie dan Sjarief (2010;319) mengatakan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu daerah yang terletak ditepi laut sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi, yang terdiri dari daratan dan perairan, dimana daerahnya masih dipengaruhi oleh aktivitas darat dan aktivitas marin yang artinya kedua daerah tersebut saling terkait. Sedangkan Budiharsono (2009;21) mengatakan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah belakang, sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memproduksi ikan, namun juga dapat dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduk yang tergolong dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan

Kota merupakan tempat bagi manusia untuk hidup dan melakukan aktivitasnya. Kota terus mengalami perkembangan akibat adanya pertumbuhan laju penduduk baik secara alamiah maupun adanya pergerakan penduduk (migrasi). Hal tersebut tentu menimbulkan peningkatan kebutuhan ruang yang mengakibatkan terjadinya pembangunan perkotaan. Ridlo (2001;4) mengatakan bahwa pembangunan perkotaan yang tidak merata dapat mengakibatkan terjadinya masalah kemiskinan pada suatu wilayah.

Wolf Scott dalam Ridlo (2001;6) mengatakan bahwa definisi kemiskinan secara luas yaitu kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki asset seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit, dan lain-lain. Ketiga, kemiskinan non-material meliputi berbagai masalah kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan kehidupan yang layak.

Faktor Kemiskinan

Kusnadi (2003;19-20) menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan, antara lain:

a) Faktor Internal

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja (pemilik perahu- nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang kurang menguntungkan bagi nelayan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan gaya hidup yang dipandang boros yang kurang berorientasi pada masa depan.

b) Faktor eksternal

Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berfokus pada produktivitas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sistem pemasaran hasil laut yang lebih menguntungkan perantara, kerusakan akan ekosistem pesisir dan laut karena terjadinya pencemaran dari wilayah darat, penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah terhadap lingkungan, terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen, kondisi alam yang fluktuatif sehingga tidak memungkinkan nelayan untuk melaut sepanjang tahun, terbatasnya peluang kerja disektor non perikanan, terjadinya isolasi geografis kampung nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (2011) mengatakan bahwa kemiskinan pesisir merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya kerusakan sumberdaya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya lokal, rendahnya infrastruktur desa serta kesehatan lingkungan permukiman.

Bentuk Kemiskinan

Sumodiningrat (2011;26-27) membagi bentuk kemiskinan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kemiskinan natural

Jenis kemiskinan ini merupakan keadaan miskin karena dari asalnya memang miskin. Kelompok ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya

manusia, maupun sumber daya pembangunan.

2. Kemiskinan kultural

Kemiskinan ini disebabkan dari gaya hidup seseorang atau kelompok masyarakat, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan serta budaya yang berlaku pada suatu tempat.

3. kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural disebabkan karena adanya faktor struktur sosial masyarakat pada suatu wilayah tertentu seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, terjadinya korupsi dan kolusi dalam tatanan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif disebut metode *interpretative* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata- kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono,2008). Metode penelitian berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan- tahapan penelitian, menyajikan fakta dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh, menentukan faktor- faktor terkait yang mempengaruhi terjadi kemiskinan pesisir di Kawasan Tambak Lorok.

Metode pengumpulan data membahas mengenai alat/ teknik pengumpulan data dan prosedur penelitian yang dilakukan meliputi penyusunan data, kebutuhan data yang diperlukan, dan langkah- langkah penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Dalam penentuan jumlah sampel, didapatkan dengan menggunakan rumus Solvin (2001). Untuk

lebih jelas mengenai penentuan sampel dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini.

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

Dalam perhitungan sampel diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kampung Nelayan Tambak Lorok yaitu 534 keluarga. Maka jumlah sample yang diambil adalah sebesar 84 sampel dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{534}{(1 + 534 * 0,1^2)} = 84$$

Sumber: Analisis Peneliti, 2013

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian, untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian sesuai dengan sasaran penelitian yang akan dicapai yaitu:

Identifikasi karakteristik kawasan

Amatan mengenai karakteristik kawasan dilihat dari tingkat kepadatan, kondisi bangunan, dan kondisi prasarana yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil tahapan ini berupa foto atau gambar mengenai kondisi kawasan.

Identifikasi karakteristik masyarakat

Amatan mengenai karakteristik masyarakat difokuskan untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi sosial masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil tahapan ini berupa grafik yang menjelaskan mengenai kondisi masyarakat yang diperoleh dari hasil olah kuesioner.

Analisis faktor kemiskinan

Peneliti dalam hal ini melihat faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan pesisir yang terjadi di wilayah studi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari tahapan ini berupa foto atau gambar, grafik mengenai faktor-faktor kemiskinan pesisir.

Analisis Bentuk Kemiskinan

Peneliti dalam hal ini mengetahui bagaimana bentuk kemiskinan yang terjadi di wilayah studi dengan melihat faktor-faktor kemiskinan yang terjadi di wilayah studi.

HASIL PEMBAHASAN

Identifikasi karakteristik kawasan

Ardiansyah (2009) mengatakan bahwa pendapatan penduduk yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya kemiskinan, sehingga berdampak pada munculnya permukiman kumuh. Menurut Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 2011 permukiman kumuh yaitu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pada kawasan RW XIV dan RW XV termasuk dalam kategori kepadatan tinggi. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil perhitungan KDB yang menunjukkan bahwa tingkat kepadatan RW XIV dan RW XIV yaitu sebesar **78%** yang termasuk dalam kategori tingkat kepadatan tinggi. Kemudian jarak antar rumah yang saling berdekatan dengan tingkat kerapatan tinggi. Kualitas bangunan dikawasan ini mayoritas 68% sudah merupakan bangunan permanen dengan menggunakan bahan dasar batu bata sebagai bahan konstruksi bangunan, namun masih terdapat 26% merupakan bangunan semi-permanen dan 6% bangunan non-permanen. Kondisi prasarana permukiman dibedakan menjadi 5, yaitu jalan, drainase, sanitasi, sampah, dan air bersih. Kondisi jalan di kawasan ini tersusun atas paving blok, namun kondisinya masih mengalami kerusakan di beberapa titik akibat seringnya terendam rob. Kondisi drainase dikawasan ini terdiri dari saluran got-got kecil dengan lebar 20-50 cm yang terbuat dari semen. Saluran drainase dikawasan ini tidak dapat berfungsi secara optimal karena adanya sumbatan dari tumpukan sampah yang mengakibatkan air tidak dapat mengalir. Pada beberapa RT, seperti RT 3 RW XIV tidak terdapat saluran drainase, sehingga pembuangan limbah cair langsung kejalan.

Prasarana sanitasi dikawasan berupa WC umum yang letaknya tersebar di beberapa titik di kawasan Tambak Lorok. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat RW XIV dan RW XV tidak memiliki WC pribadi di dalam rumah. Masyarakat RW XIV dan RW XV membuang sampah langsung ke tanah kosong maupun kelaut. Namun pada beberapa RT, seperti RT 4 RW XV pengolahan sampah dilakukan dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengangkut sampah 2 hari sekali dengan membayar 7000/bulan. Letak Tambak Lorok yang dekat dengan laut mengakibatkan PDAM tidak dapat menjangkau ke kawasan ini, karena air dapat bercampur dengan rob. Didalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat RW XIV dan RW XV yang memiliki penghasilan lebih dapat membangun sumur artesis di rumah mereka. Sumber air tersebut nantinya akan disalurkan kepada rumah-rumah lain yang tidak mampu membuat sumur sendiri melalui pipa-pipa kecil yang dipasang meteran. Biaya yang harus dibayarkan warga untuk membeli air bersih $\pm 3500/m^3$.

Identifikasi Karakteristik Masyarakat

Menurut Kornita dan Yusbar (2011) karakteristik masyarakat miskin ditinjau dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan mata pencaharian. Sedangkan, Zarmawis (2003;32-33) mengatakan bahwa karakteristik sosial masyarakat dilihat dari lama tinggal, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan status kepemilikan rumah. Lokasi Tambak Lorok yang dekat dengan laut mengakibatkan mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai nelayan. pekerjaan nelayan yang sangat tergantung dengan musim mengakibatkan tingkat pendapatan nelayan tidak menentu. Para nelayan mengatakan bahwa dalam seminggunya mereka dapat melaut sebanyak 3-4x dan sekali melaut memperoleh pendapatan $\pm Rp.50.000,-$. Jika dilakukan perhitungan dengan jumlah pendapatan tersebut maka dalam sebulan nelayan memperoleh penghasilan $\pm Rp.800.000,-$ dengan jumlah tanggungan rata-rata 3-4 orang, sehingga pendapatan perkapita yaitu Rp.200.000,-/kapita. Padahal menurut BPS

(2011) diketahui bahwa garis kemiskinan Kota Semarang yaitu Rp.246.195,-/kapita. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan nelayan masih berada dibawah garis kemiskinan Kota Semarang.

Sedangkan, pada kondisi sosial masyarakat dilihat dari usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dan status kepemilikan rumah. Mayoritas masyarakat RW XIV dan RW XV termasuk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 92%, yang seharusnya dapat melakukan berbagai macam pekerjaan yang ditekuni secara optimal. tingkat pendidikan masyarakat pesisir masih tergolong rendah karena mayoritas pendidikan tertinggi adalah tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebesar 68%, 11% tidak sekolah, 15% SMP, dan 6% berhasil hingga jenjang SMA/ sederajat. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa mayoritas jumlah tanggungan pada masing- masing KK yaitu sebesar 3-4 orang. Untuk status kepemilikan rumah sebesar 77% merupakan rumah milik pribadi, 19% merupakan warisan orang tua, 4% menumpang pada keluarga, dan 1% menyewa.

Analisis Faktor Kemiskinan

- kerusakan sumber daya pesisir

Kebiasaan masyarakat RW XIV dan RW XV yang 60% masyarakatnya membuang sampah rumah tangga langsung kelaut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem laut akibat pencemaran dari wilayah darat. Tidak adanya tempat pembuangan sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sisa rumah tangga menjadi penyebab masyarakat masih membuang sampah langsung kelaut. Selain itu diketahui bahwa 83% nelayan RW XIV dan RW XV menggunakan alat tangkap berupa arad untuk memperoleh hasil tangkapan, padahal Kushandajani (2010) mengatakan bahwa penggunaan alat tangkap (arad, cantrang, jebak, dogol) menjadi permasalahan, karena tidak ramah lingkungan. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi kemiskinan pesisir karena selain merusak ekosistem lain juga mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan

karena jika terjadi kerusakan ekosistem laut, maka nelayan yang sangat bergantung pada hasil laut akan kesulitan untuk mendapat hasil tangkapan.

- Rendahnya Infrastruktur Desa

Jalan, pembangunan jalan menggunakan paving blok di kawasan Tambak Lorok dilakukan pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012 yang dilakukan oleh warga Tambak Lorok sendiri dan dibantu oleh pihak pemerintah. Dulunya sebelum jalan mengalami perbaikan jalan masih berupa tanah, sehingga jika terjadi hujan jalan menjadi becek. Kondisi jalan yang seperti itu mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat dikarenakan pada kawasan tersebut terdapat TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pedagang ikan dan menjadi tempat bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. Dengan kondisi jalan yang telah diperbaiki dirasa masyarakat sudah merasa cukup puas. Namun, masih terdapat kerusakan pada beberapa titik akibat sering terendam rob.

Drainase, jaringan drainase merupakan prasarana penting yang berfungsi untuk mengalirkan limbah cair rumah tangga dan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan. Dengan adanya sistem drainase yang baik mampu meminimalisasi terjadinya bencana banjir disuatu kawasan. Kondisi drainase dikawasan ini terdiri dari got-got kecil dengan lebar 20-50 cm yang terbuat dari semen dengan kondisi tersumbat sampah sehingga tidak dapat menampung limpasan air rob. Kondisi ini mengakibatkan rumah warga terendam sehingga mengalami kerusakan seperti dinding dan lantai retak serta perabotan rumah rusak. Kerusakan yang terjadi akibat limpasan rob mempengaruhi kemiskinan karena masyarakat harus memperbaiki rumah dan menguruk tanah rumah mereka, sehingga terjadi ketidakmampuan menyisihkan pendapatan untuk ditabung karena mereka harus selalu memperbaiki rumah secara berkala.

Sanitasi, Pada RW IXV terdapat 2 MCK umum dan pada RW XV terdapat 2 MCK umum yang

lokasinya tersebar di beberapa tempat. Pembangunan MCK umum di kawasan ini merupakan bantuan dari pihak pemerintah. Namun, ketersediaan MCK umum pada kawasan ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, karena masih terdapat beberapa masyarakat yang melakukan kegiatan MCK langsung di tepi laut atau sungai. Sistem sanitasi yang langsung kelaut mengakibatkan terjadinya pencemaran ekosistem laut yang mengganggu kehidupan ekosistem laut yang merupakan sumber mata pencaharian warga.

Sampah, tidak tersedianya sarana persampahan pada kawasan ini tentunya berakibat kepada munculnya perilaku masyarakat yang membuang sampah pada tanah kosong atau laut sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan lingkungan dan mengurangi nilai estetika kawasan, karena banyak sampah berserakan di sekitar kawasan tersebut. Tidak adanya sistem pengolahan sampah yang baik dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran sumber daya laut. Dengan terjadinya pencemaran sumber daya laut dapat merusak ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat RW XIV dan RW XV yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Pendapatan dari nelayan sangat tergantung dari banyak sedikitnya hasil tangkapan, jika terus terjadi pencemaran laut dari wilayah darat bukan tidak mungkin nelayan akan semakin miskin karena semakin sulit memperoleh hasil tangkapan.

Air Bersih, berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat RW XIV dan RW XV yang memiliki penghasilan lebih dapat membangun sumur artesis pada rumah mereka. Sumber air tersebut nantinya akan disalurkan kepada rumah-rumah lain yang tidak mampu membuat sumur artesis melalui pipa-pipa kecil yang dipasang meteran, sehingga untuk pembayaran air bersih didasarkan pada besarnya meteran pada setiap rumah. Biaya yang harus dibayar warga untuk membeli air bersih yaitu sebesar ± 3500/m³. Padahal tarif dasar PDAM menurut

Peraturan Walikota Semarang Nomor 6A Tahun 2009 mengenai penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Semarang periode tahun 2009 s/d tahun 2013 yaitu Rp.2035/m³. Ketidakterjangkauan PDAM di kawasan ini mengakibatkan masyarakat harus membayar air bersih lebih mahal, padahal kondisi tingkat pendapatan masyarakat masih tergolong miskin.

- Kualitas Sumber Daya Manusia, dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan seseorang. Kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan, ketrampilan dan tingkat kesehatan (SMERU 2001 dalam Rejekiingsih, 2006). Tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat RW XIV dan RW XV yang tergolong rendah mengakibatkan mereka tidak dapat menjangkau peluang kerja yang lebih luas, sehingga kondisi tersebut berdampak pada tingkat pendapatan yang diperoleh pun masih tergolong cukup rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Kepemilikan Modal Usaha, pada umumnya bagi masyarakat RW XIV dan RW XV tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan produktivitasnya ke skala yang lebih besar sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh. Terdapat usaha simpan pinjam bagi nelayan di lokasi TPI yang pembayarannya bisa dicicil/ dipotong dari hasil penjualan ikan. Namun, masyarakat lebih memilih untuk memperoleh modal dari usaha sendiri dibandingkan harus melakukan pinjaman ke bank/ orang lain, karena adanya rasa tidak percaya diri dari masyarakat untuk dapat mengembalikan uang yang mereka pinjam. Dalam melaksanakan kegiatan melaut para nelayan memperoleh modal usaha dari modal yang mereka usahakan sendiri. Dalam sekali melaut para nelayan membutuhkan solar ± 15- 25 liter. Besarnya modal usaha yang mereka keluarkan tergantung pada jarak tempuh melaut untuk mencari ikan.

- Hubungan Kerja, pada kawasan ini tidak terdapat paguyuban nelayan, namun hubungan antar nelayan sangat baik dan saling membantu. Namun, pada RW XV RT 01-

03 terdapat paguyuban bagi para nelayan, yang dapat digunakan nelayan sebagai tempat untuk melakukan peminjaman modal. Selain itu, paguyuban juga merupakan wadah untuk menampung bantuan yang diberikan dari pihak pemerintah seperti bantuan mesin perahu. Mayoritas masyarakat pesisir yang bermatapencaharian sebagai nelayan di RW XIV dan RW XV bekerja sendiri didalam melaut karena mereka memiliki perahu sendiri dengan kapasitas satu orang. Namun, beberapa nelayan mengaku bahwa mereka terkadang ikut menumpang dengan nelayan pemilik perahu dalam melakukan kegiatan menangkap ikan dilaut karena mereka tidak memiliki perahu sendiri. Dalam sistem bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan penumpang, diketahui bahwa hasil melaut dibagi sama rata, sehingga tidak terjadi adanya ketimpangan pendapatan. Dari hasil tangkapan yang diperoleh biasanya para nelayan menjualnya langsung hasil tangkapan kepada tengkulak. Bagi nelayan kecil lebih memilih untuk menjual langsung ketengkulak karena harganya dirasa lebih cocok. Hasil tangkapan yang dijual ke TPI merupakan hasil tangkapan dengan skala besar, sehingga bagi nelayan kecil yang dalam sekali melaut hanya memperoleh 3-5 kg lebih memilih menjual ketengkulak terlebih dahulu yang kemudian para pengepul akan menjual hasil tangkapan tersebut ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

- Gaya Hidup, para masyarakat pesisir tidak memiliki pandangan yang berorientasi pada masa depan seperti menabung karena kondisi keuangan mereka yang rendah. Pendapatan yang mereka peroleh lebih diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang mereka peroleh biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti untuk makan sehari-hari, membiayai sekolah anak, atau digunakan untuk memperbaiki rumah mereka yang mengalami kerusakan akibat rob. Dari penelitian yang dilakukan 85% masyarakat nelayan, saat tidak pergi melaut mereka cenderung menghabiskan waktu dirumah untuk memperbaiki alat tangkap. Hal ini mengakibatkan mereka terus berada pada

kemiskinan karena tidak adanya upaya dari dalam diri untuk berubah memperbaiki nasib. Pernyataan tersebut menjelaskan mengenai budaya malas, tidak disiplin dan sifat pasrah masyarakat pesisir terhadap kondisi yang mereka alami. Faktor gaya hidup dalam pemanfaatan waktu luang mempengaruhi kemiskinan suatu masyarakat, karena pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, semakin turun tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno dalam Prasetyo,2010). Selain itu adanya pola konsumtif masyarakat yang mengkonsumsi rokok, dimana 81% masyarakat merupakan perokok aktif. Padahal rokok bukan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi setiap harinya dalam satu keluarga.

Analisis Bentuk Kemiskinan, dari uraian mengenai faktor kemiskinan yang dilakukan bentuk kemiskinan yang terjadi pada kawasan Tambak Lorok RW XIV dan RW XV yaitu bentuk kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural dengan ciri sebagai berikut:

- Kemiskinan natural
 - Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah, 68% kepala keluarga tingkat pendidikan pada jenjang SD, 95% tidak pernah mengikuti pelatihan ketrampilan.
 - Kepemilikan modal usaha, 100% responden mengatakan bahwa mereka tidak memiliki modal usaha untuk mengembangkan usahanya keskala yang lebih besar.
 - Kondisi infrastuktur yang belum memadai, 60% masyarakat membuang sampah langsung kelaut yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya pesisir, ketidakterjangkauan PDAM mengakibatkan masyarakat harus membayar ongkos lebih mahal (3500/m³) untuk memperoleh air bersih.
- Kemiskinan kultural, 85% masyarakat memilih menganggur dirumah saat tidak pergi melaut. 81% merupakan perokok aktif.
- Kemiskinan struktural, Adanya sistem peminjaman modal yang disukai/kerabat

yang memperoleh pinjaman mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengembangkan usahanya, namun mayoritas nelayan dalam memperoleh modal usaha untuk melaut lebih memilih untuk diusahakan sendiri dibandingkan harus meminjam ke orang lain, sehingga adanya sistem peminjaman modal seperti itu tidak mempengaruhi modal usaha nelayan.

Dari uraian diatas, bentuk kemiskinan yang paling mendominasi di kawasan Tambak Lorok RW XIV dan RW XV yaitu kemiskinan natural. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan dan ketrampilan mayoritas masyarakat yang rendah. Hal ini mengakibatkan terbatasnya peluang kerja yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat pesisir tidak mampu membiayai sekolah anak-anak pesisir, sehingga anak pesisir tidak mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik yang nantinya mempengaruhi lingkup kerja mereka yang terbatas. Hal ini mengakibatkan terjadinya perputaran kemiskinan di kawasan pesisir secara terus menerus.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kemiskinan yang terjadi di kampung nelayan tambak lorok disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya kepemilikan modal usaha dan teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dengan rendahnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat yaitu Sekolah Dasar (SD) dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat Tambak Lorok. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan masyarakat Tambak Lorok tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh bidang kerja yang lebih luas. Pekerjaan nelayan yang sangat tergantung pada musim mengakibatkan para nelayan harus memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Didalam pekerjaan nelayan memang tidak dibutuhkan pendidikan dan ketrampilan khusus, namun hanya dibutuhkan kekuatan fisik serta pengalaman. Mimminya kepemilikan modal usaha dan teknologi yang digunakan nelayan Tambak Lorok mengakibatkan mereka tidak dapat mengembangkan usahanya ke skala yang lebih besar. Penguasaan teknologi sederhana serta kapasitas perahu yang kecil mengakibatkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Para nelayan tradisional lebih berorientasi kepada mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tanpa memikirkan investasi jangka panjang. Sedangkan, gaya hidup masyarakat ditandai dengan pengalokasian pendapatan dan waktu para masyarakat pesisir. Dengan kondisi ekonomi yang dapat dikatakan rendah, banyak masyarakat pesisir yang bersifat konsumtif merokok. Padahal rokok bukanlah kebutuhan primer yang harus dipenuhi sehari-hari. Selain itu pengalokasian waktu bagi para nelayan yang tidak sedang melaut. Jika para nelayan tidak melaut biasanya mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya menganggur dirumah atau sekedar memperbaiki alat tangkap mereka. Mereka tidak mencoba untuk mencari pekerjaan sampingan. Anggapan dari para nelayan yang merasa bahwa diluar pekerjaan nelayan mereka merasa tidak cocok menyebabkan para nelayan terus berada pada kondisi miskin, karena mereka tidak mau mencoba keluar untuk berusaha memperoleh pendapatan lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari uraian diatas maka bentuk kemiskinan yang terjadi di kawasan Tambak Lorok merupakan bentuk kemiskinan natural.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian terhadap permasalahan kemiskinan di RW XIV dan RW XV Kampung Tambak Lorok, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan terhadap kondisi prasarana di kawasan Tambak Lorok, terutama pada layanan dasar masyarakat seperti persampahan, drainase, dan air bersih dikarenakan lokasinya yang dekat

- dengan laut mengakibatkan kawasan ini sering terendam rob yang merugikan warga.
- Adanya TPI di Kawasan Tambak Lorok merupakan aspek penting bagi masyarakat sekitar karena merupakan tempat mata pencaharian mereka, selain itu TPI Tambak Lorok merupakan tempat penjualan hasil laut yang cukup terkenal di Kota Semarang sehingga perlu adanya perhatian terhadap prasarana pendukung agar masyarakat diluar Tambak Lorok semakin tertarik dan nyaman untuk datang ke Tambak Lorok, dimana kondisi tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya.
 - Perlu adanya perhatian terhadap kebijakan penangkapan hasil laut bagi masyarakat, agar tidak merusak ekosistem laut yang merupakan mata pencaharian mereka. Selain itu, pengenalan terhadap teknologi penangkapan yang lebih modern dan teknologi pengolahan pasca panen sehingga para nelayan dapat meningkatkan produktivitasnya.
 - Perlu adanya perhatian khusus untuk membangun kualitas sumber daya manusia di kawasan pesisir seperti pelaksanaan pelatihan ketrampilan, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan nilai jual masyarakat.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Ardiansyah, Adi. 2009. *Dampak Kemiskinan Kota Terhadap Perumahan dan Permukiman di Kota-Kota Besar Indonesia*. Artikel Bulletin Teras.
- BPS.2011. *Kecamatan Semarang Utara Dalam Angka 2011*. Kantor Statistik Kota Semarang.
- Budiharsono, Sugeng. 2009. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan lautan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Herusansono, Winarto. 2012. *Kampung Tambak Lorok Bakal tenggelam*. Available at:<http://regional.kompas.com/read/2012/01/25/17422154/Kampung.Tambaklorok.Bakal.Tenggelam>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2012.
- Ismail, Zarmawis (ed). 2003. *Dampak Kerusakan Lingkungan Pesisir Terhadap Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Tiga Daerah*. Jakarta: P2E-LIPI (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
- J. Kodoatie, Robert dan Sjarief, Roestam. 2010. *Tata Ruang Air*. Jogjakarta: CV. Andi Offset
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2012. *Kemiskinan Desa Pesisir Akibat Infrastruktur Minim*. Available at:<http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/6166/Kemiskinan-Desa-Pesisir-Akibat-Infrastruktur-Minim/>. Diakses pada tanggal 20 September 2011.
- Kornita, Sri Endang dan Yusbar Yusuf. 2011. *Strategi Bertahan Hidup (Libe Survival Strategy) Penduduk Miskin Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan*. Jurnal Ekonomi, Vol 19, no 4.
- Kushandajani. 2010. "Makna Otonomi Daerah di Wilayah Laut Bagi masyarakat Pesisir kota Semarang". Jurnal Media Hukum, Vol. 17. Juni, hal. 57-72
- Kusnadi.2009.*Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta : Ar-RuzzMedia, Pusta Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaga Penelitian, Universitas Jember.
- Prastyo, Adita Agus. 2010. "Analisis faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rejekiingsih, Tri Wahyu. 2011. "Identifikasi faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural". Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12, Nomor 1, Juni, hal. 28-44.
- Ridlo, Muhammad Agung, MT.2001. *Kemiskinan diPerkotaan*.Semarang:Unisulla Press.
- Sugiyono,.2008. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Sumodiningrat M.Ec, Gunawan. 2011. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: IDEA (Institute of Development and Economic Analysis).
- Undang- Undang RI Nomer 1 Tahun 2011 mengatakan bahwa permukiman kumuh